



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

FITUR BARU SIREKAP DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK 2024

Anin Dhita Kiky Amrynudin
Analisis Legislatif Ahli Muda
anin.amrynudin@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara dan proses rekapitulasi serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil perhitungan suara dalam pemilihan umum (pemilu) yang dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Namun demikian, penggunaan Sirekap pada waktu pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024 menuai kritikan dari masyarakat.

Keresahan muncul saat mengetahui situs Sirekap sempat mengalami *down* dan kemudian saat berfungsi kembali mulai ditemukan kejanggalaan-kejanggalaan di banyak tempat. Hal ini terkait data anomali dalam aplikasi tersebut. Data anomali merupakan data yang karakteristiknya secara signifikan menyimpang/berbeda dengan data pada umumnya. Fenomena tersebut menjadi polemik karena adanya perbedaan jumlah suara yang signifikan antara formulir C hasil Plano dan angka yang terbaca dalam Sirekap. Kasus data anomali tersebut mencapai 24,2% dari jumlah suara yang masuk ke Sirekap per 22 Februari 2024. Data anomali tersebut terjadi karena kesalahan pengisian pada kolom formulir C1 serta keterbatasan perangkat pendukung pemindaian dari formulir ke Sirekap.

Pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tanggal 27 November 2024 KPU RI tetap akan menggunakan aplikasi Sirekap untuk proses rekapitulasi perhitungan hasil pilkada. Namun demikian, atas dasar permasalahan yang pernah terjadi pada pemilu 14 Februari 2024 maka KPU RI melakukan pembenahan pada aplikasi Sirekap dengan menambahkan fitur baru, yakni: *pertama*, fitur *arithmetic guard* yang berfungsi untuk memastikan kebenaran hasil input angka penjumlahan. *Kedua*, perubahan kolom pada formula input data rekapitulasi. *Ketiga*, perbaikan sistem *optical mark recognition* (OMR) dan *optical character recognition* (OCR) untuk mempercepat input data. *Keempat*, KPU menambahkan opsi pemindahan data melalui *bluetooth* apabila jaringan internet mengalami gangguan.

Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) mengingatkan KPU RI untuk melakukan pengecekan dan pengujian sistem secara berkala demi mengantisipasi gangguan siber sebagai pelajaran pada saat pengalaman pada pemilu 14 Februari 2024. Gangguan siber yang mungkin terjadi adalah serangan *distributed denial of service* (DDoS) yang dapat menghambat sistem bekerja secara optimal dengan membanjiri sistem dengan *traffic-traffic* tertentu sehingga KPU RI perlu mengantisipasi serangan siber yang mungkin terjadi dengan melakukan pengecekan dan pengujian sistem secara berkala. Selain itu, ICSF juga mengingatkan agar KPU RI juga melakukan pengecekan dan pengujian pada infrastruktur seperti komputer, *server* serta *smartphone* yang digunakan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) harus *compatible* dengan fitur yang disajikan atau harus ada standar terkait *equipment* yang digunakan.

Faktor lainnya yang perlu diperhatikan adalah terkait pengetahuan dan pemahaman petugas KPPS dalam menggunakan fitur yang ada pada Sirekap. Selain itu, KPU RI juga perlu menambahkan opsi penggunaan *Virtual Private Network* (VPN) sebagai upaya antisipasi serangan siber pada saat rekapitulasi berlangsung. KPU RI juga sebaiknya memberikan layanan *call center* atau tanggap cepat untuk petugas KPPS sehingga apabila terjadi kendala di lapangan dapat segera diatasi.

Atensi DPR

Komisi II DPR RI telah mengadakan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian dan lembaga terkait untuk membahas persiapan pilkada serentak tahun 2024 untuk memastikan semua aspek terkait pilkada serentak 2024 berjalan dengan baik, termasuk hadirnya fitur baru dalam Sirekap. Komisi II DPR RI dalam konteks ini melalui fungsi pengawasannya dapat meminta KPU RI untuk melakukan pengecekan dan pengujian terhadap aplikasi Sirekap beserta kesiapan infrastruktur, perangkat pendukung, keamanan jaringan dan server serta kemampuan petugas KPPS dalam mengoperasikan Sirekap dengan fitur baru. Selain itu, KPU RI juga perlu mempertimbangkan penggunaan *Virtual Private Network* (VPN) sebagai upaya antisipasi serangan siber pada saat rekapitulasi berlangsung. KPU RI juga dapat menyediakan layanan *call center* atau tanggap cepat untuk petugas KPPS manakala terjadi kendala di lapangan agar dapat diatasi dengan cepat.

Sumber

antaranews.com, 23 September 2024;
detik.com, 12 November 2024;
rumahpemilu.org, 12 November 2024;
Kompas, 27 Februari 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman
Rachmi Suprihartanti S.

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani
Eka Budiyantri

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

